

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GAMPONG ACEH TERHADAP PROGRAM
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SITI SARIMA
NIM. 220802112**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Siti Sarima

NIM : 220802112

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Judul : Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2026



Siti Sarima
NIM. 220802112

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GAMPONG ACEH TERHADAP PROGRAM
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SITI SARIMA
NIM. 220802112

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyah kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Siti Nur Zulkha, M.Si.
NIP. 199002282018032001



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH TERHADAP PROGRAM TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SITI SARIMA

NIM. 220802112

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa 18 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 199002282018032001

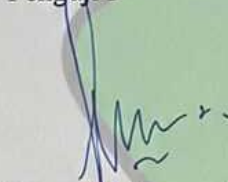
Penguji I



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

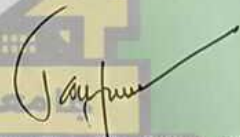
NIP. 197911172023212012

Penguji II



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.

NIP. 197802032005041001



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



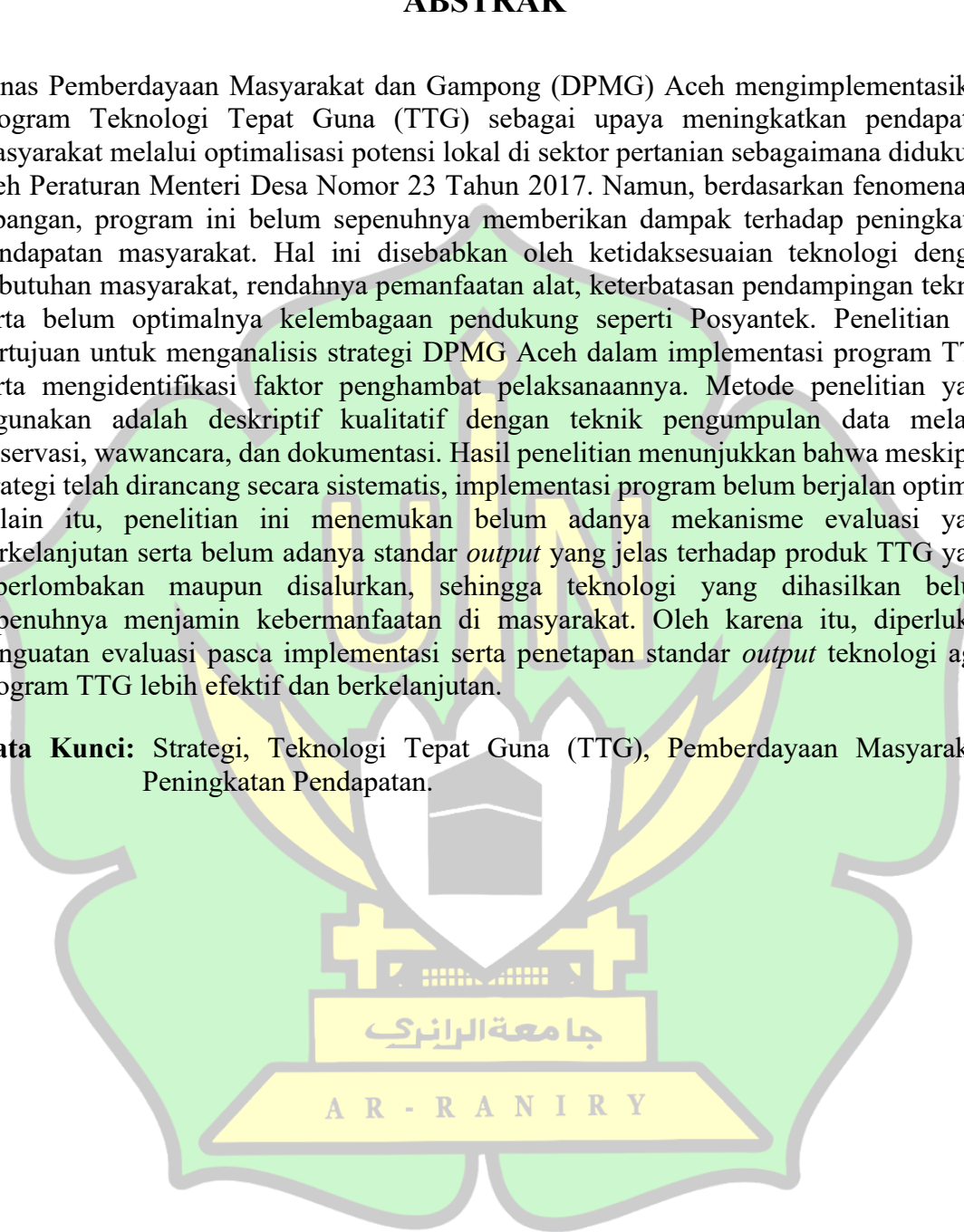
Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.

NIP. 197403271990031005

ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh mengimplementasikan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal di sektor pertanian sebagaimana didukung oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017. Namun, berdasarkan fenomena di lapangan, program ini belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya pemanfaatan alat, keterbatasan pendampingan teknis, serta belum optimalnya kelembagaan pendukung seperti Posyantek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi DPMG Aceh dalam implementasi program TTG serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi telah dirancang secara sistematis, implementasi program belum berjalan optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan belum adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan serta belum adanya standar *output* yang jelas terhadap produk TTG yang diperlombakan maupun disalurkan, sehingga teknologi yang dihasilkan belum sepenuhnya menjamin kebermanfaatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan evaluasi pasca implementasi serta penetapan standar *output* teknologi agar program TTG lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi, Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Pendapatan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.AP., selaku Dosen Wali sekaligus Pembimbing II penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.

7. Kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada ayahanda Sudirman dan ibunda Rosmala Dewi tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah henti diberikan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis, serta selalu hadir memberikan apa pun yang dibutuhkan, baik secara moral maupun materiil, termasuk dukungan finansial selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Segala pengorbanan, cinta, dan keikhlasan yang telah diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada ayah dan ibu.
9. Kepada adik-adik tercinta, serta keluarga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, perhatian, keceriaan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dan sahabat, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat.
11. Kepada diri saya sendiri, penulis mengucapkan terima kasih atas segala usaha, perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilakukan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ke depan dapat terus berkembang, lebih baik, dan mencapai kesuksesan di dunia maupun akhirat, Amiin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2026

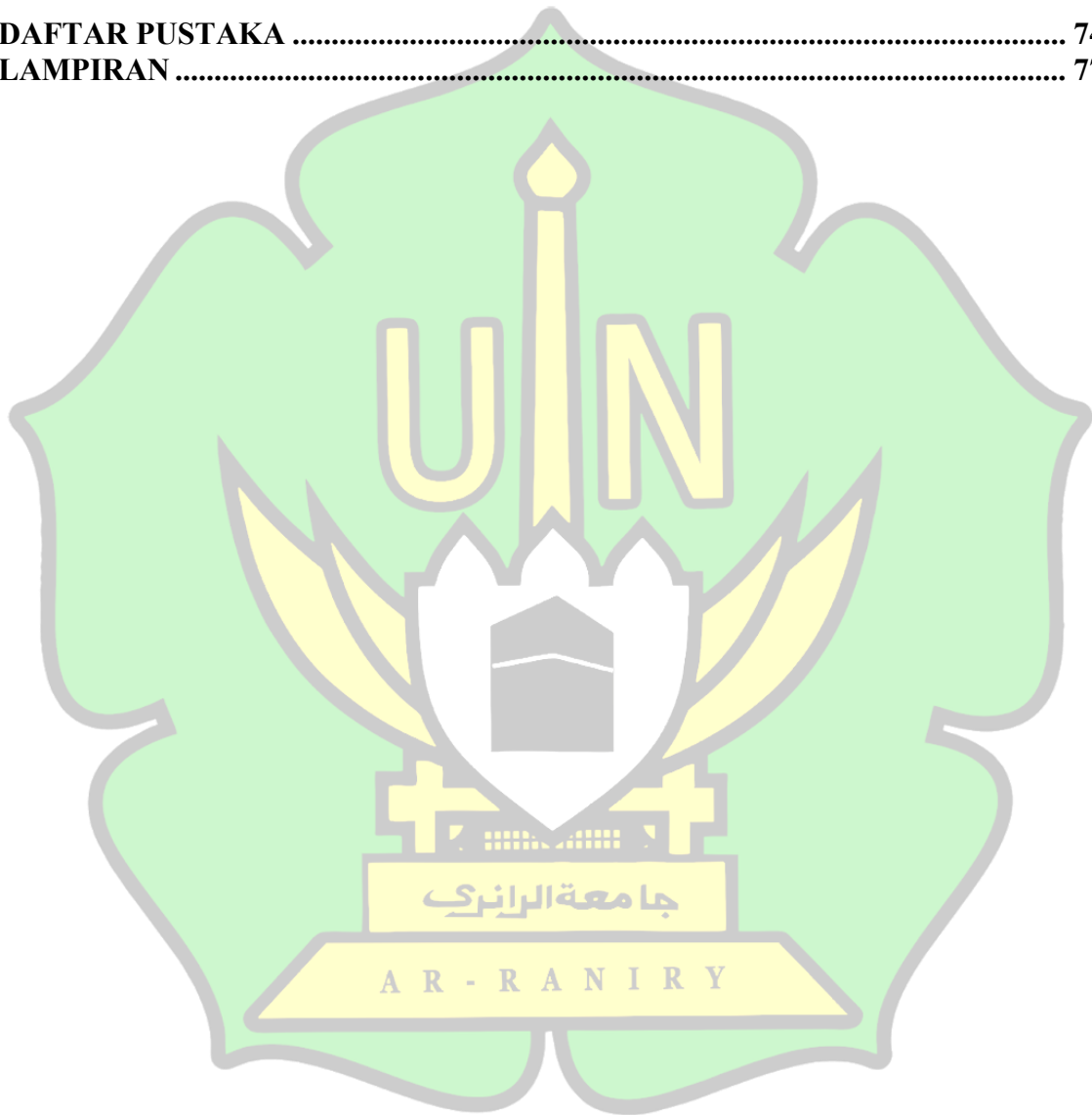


Siti Sarima
NIM. 220802112

DAFTAR ISI

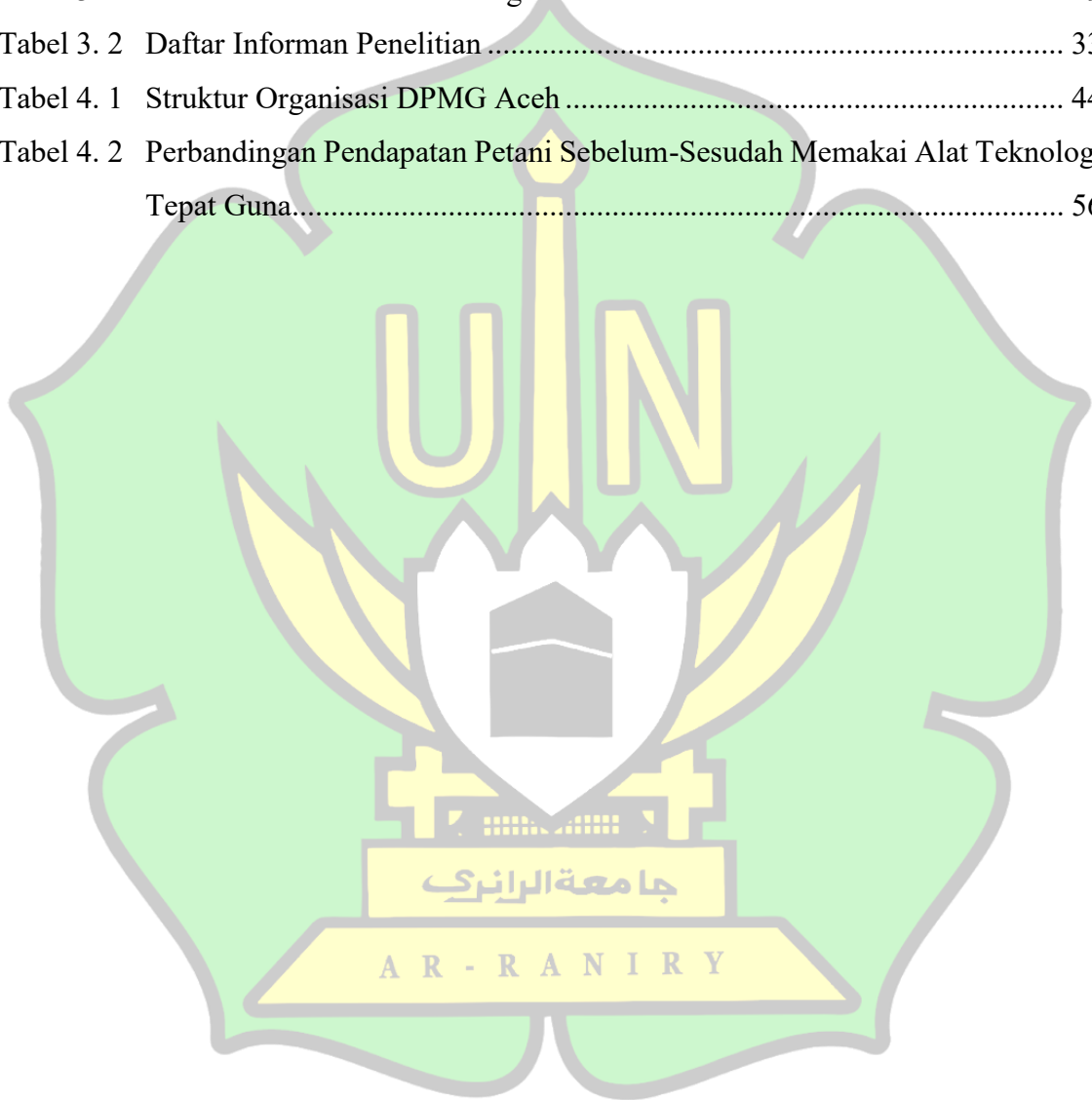
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Strategi	9
2.1.1.1 Pengertian Strategi.....	9
2.1.1.2 Definisi Strategi Menurut Para Ahli.....	10
2.1.1.3 Teori Strategi	12
2.1.1.4 Jenis-Jenis Strategi	14
2.1.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	18
2.1.3 Teknologi Tepat Guna (TTG)	19
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Informan Penelitian.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Program Teknologi Tepat Guna (TTG)	45

4.1.3 Faktor yang Menghambat Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam Pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG).....	60
4.2 Pembahasan Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kategorisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Provinsi Aceh Tahun 2025.....	2
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1	Dimensi dan Indikator Strategi DPMG Aceh.....	29
Tabel 3. 2	Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 4. 1	Struktur Organisasi DPMG Aceh.....	44
Tabel 4. 2	Perbandingan Pendapatan Petani Sebelum-Sesudah Memakai Alat Teknologi Tepat Guna.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alokasi & Realisasi Dana Desa Aceh Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023	4
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir	77
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	78
Lampiran 3 Surat Balasan Instansi	80
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.¹ Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri rumah tangga belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat karena masih terdapat keterbatasan penggunaan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, dan pendampingan.² Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 menegaskan pentingnya pengembangan dan penerapan TTG oleh pemerintah daerah.⁴ DPMG Aceh kemudian melaksanakan program melalui penguatan Posyantek, pendampingan, serta pengembangan dan penerapan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program TTG di Aceh pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan regulasi. Teknologi yang diberikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah dimanfaatkan, serta didukung pendampingan agar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan. Namun, masih

¹ Atik Rochaeni, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Publik*, Penerbit Manggu (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Sari, 2025).

² Faisal Amir and Jumadi Jumadi, "Pengolahan Produk Pasca Panen Hasil Perikanan di Aceh Menggunakan Teknologi Tepat Guna," *Jurnal POLIMESIN* 14, no. 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.30811/jpl.v14i2.336>.

³ Nur Wahid, *Teknologi Tepat Guna* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2023).

⁴ Mendagri RI, "Permendagri No. 23 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*, vol. 1, 2017.

ditemukan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya disimpan. Selain itu, sebagian teknologi yang dikembangkan belum dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan karena terkendala perawatan dan layanan teknis di daerah.⁵

DPMG Aceh memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan Teknologi Tepat Guna di tingkat provinsi. Implementasi program Teknologi Tepat Guna dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penguatan kelembagaan, pendampingan teknis, dan distribusi alat Teknologi Tepat Guna.⁶ Penguatan kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan dan revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) sebagai pusat inovasi di tingkat masyarakat. Sementara itu, pendampingan teknis dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengoperasikan teknologi.⁷

Tabel 1. 1 Kategorisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Provinsi Aceh Tahun 2025

Kategori Posyantek	Jumlah
Pasif	855
Aktif	77
Tegak	3
Mandiri	2
Total	937

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Nomor 414.24/DPMG/2025 tentang Penetapan Kategorisasi Posyantek Kabupaten/Kota Tahun 2025.

⁵ Muhammad Agil Zuhari, "Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mewujudkan Daerah Mandiri Dan Berkelanjutan," *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2025): 160–68.

⁶ Pemerintah Provinsi Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)," *Badan Pemeriksa Keuangan Aceh*, 2014.

⁷ Pemerintah Provinsi Aceh, "Jumlah Peralatan Teknologi Tepat Guna Pertanian Di Desa Menurut Desa Provinsi Aceh (IDM)," 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2025 terdapat 937 Posyantek di Provinsi Aceh. Namun, sebanyak 855 Posyantek masih berada pada kategori pasif, sedangkan hanya 77 Posyantek yang berkategori aktif, 3 Posyantek berkategori tegak, dan 2 Posyantek yang telah mencapai kategori mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Posyantek di Aceh belum berfungsi secara optimal sebagai pusat pelayanan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna di masyarakat. Padahal, Posyantek merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program TTG melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, diseminasi inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna di Aceh pada dasarnya diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan daerah. Laporan DPMG Aceh (2024) mencatat bahwa penggunaan mesin perontok padi dan alat pengering gabah mampu meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi kerja petani, serta inovasi alat pengolahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah dibandingkan metode tradisional. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terjadi di lapangan, karena berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian alat Teknologi Tepat Guna yang diberikan tidak dapat digunakan secara optimal akibat tidak sesuai dengan kebutuhan petani maupun kondisi setempat, bahkan ada yang tidak dimanfaatkan sama sekali karena sulit dioperasikan atau tidak memenuhi standar penggunaan.⁸

Implementasi program Teknologi Tepat Guna di tingkat daerah mengidentifikasi sejumlah kendala yang berulang, seperti ketidaktepatan sasaran program, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis, serta lemahnya koordinasi antar tingkat

⁸ Wawancara awal dengan pihak DPMG Aceh Pada Oktober 2025.

pemerintahan.⁹ Permasalahan ini menunjukkan bahwa tantangan penerapan Teknologi Tepat Guna tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan program manajemen dan kebijakan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap strategi yang digunakan oleh DPMG Aceh, khususnya dalam mengintegrasikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan evaluasi agar program Teknologi Tepat Guna dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Alokasi & Realisasi Dana Desa Aceh Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

Sumber: Website dpmg.acehprov.go.id

Peningkatan alokasi dana desa dari Rp 4,61 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 4,73 triliun pada tahun 2025 membuka peluang besar bagi pengembangan Teknologi

⁹ Ansharullah, Muhammad Natsir, Sitti Aida Adha Taridala, dkk., "Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengolahan Kelapa Terpadu di Desa Lambangi, Konawe Selatan, melalui Program Kemitraan Wilayah," *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 317–323.

Tepat Guna secara mandiri di tingkat desa.¹⁰ Kondisi ini memberikan ruang strategis bagi DPMG Aceh untuk memperkuat peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring ekonomi desa. Dalam perspektif kebijakan publik, momentum ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memastikan bahwa pemanfaatan dana desa dapat selaras dengan program Teknologi Tepat Guna guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.¹¹

Implementasi Teknologi Tepat Guna sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.¹² Namun, terdapat kecurigaan penelitian bahwa strategi yang diterapkan oleh DPMG Aceh belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara optimal, khususnya dalam memanfaatkan Lomba dan Expo Teknologi Tepat Guna sebagai instrumen diseminasi inovasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis secara mendalam strategi DPMG Aceh dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis strategi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan Program Teknologi Tepat Guna masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang

¹⁰ DPMG, “Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. ‘Penyaluran Dana Desa Di Aceh Tahun 2024 Dan Alokasi Tahun 2025,’ DPMG Aceh, 2024-2025.,” 2024.

¹¹ Yai Febdia Pradani, Dian Julianto Wahyudi, and Danang Yugo Pratomo, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Teknologi Tepat Guna Alat Press Hidrolik Di Bank Sampah Semangka 8, Desa Tambaksari,” *I-Com: Indonesian Community Journal* 5, no. 3 (2025).

¹² Soebianto, Totok Mardikanto, and Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Alfabeta, 2021).

menggunakan teori strategi Richard Rumelt untuk menganalisis implementasi Program Teknologi Tepat Guna pada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, juga belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program Teknologi Tepat Guna agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam mengimplementasikan Program Teknologi Tepat Guna dengan menggunakan teori strategi Richard Rumelt. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna (TTG)."

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Implementasi Teknologi Tepat Guna masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan lokal, rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengoperasikan teknologi, serta terbatasnya pendampingan teknis yang berkelanjutan.
3. Koordinasi dan strategi pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna oleh DPMG Aceh belum berjalan secara maksimal, sehingga inovasi yang dihasilkan belum

sepenuhnya berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam implementasi program Teknologi Tepat Guna (TTG)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam implementasi program Teknologi Tepat Guna (TTG).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang manajemen strategis sektor publik dan implementasi kebijakan publik, dengan

menguji penerapan teori manajemen strategi (kriteria Rumelt) dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.

2. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan studi pembandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, inovasi teknologi, dan manajemen strategi di sektor publik, khususnya di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Secara praktis, bagi DPMG Aceh sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan perencanaan dan implementasi program Teknologi Tepat Guna ke depan, sehingga lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk peningkatan pendapatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Strategi

2.1.1.1 Pengertian Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai serangkaian langkah terencana yang disusun secara sistematis oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan. Strategi mencakup perumusan visi, penetapan sasaran, serta penentuan langkah-langkah operasional yang terarah dan terukur. Keberadaan strategi juga mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga mampu menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan yang terstruktur dan terarah.¹³

Strategi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kompetensi aparatur menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi strategi yang telah dirumuskan secara matang. Pemanfaatan potensi lingkungan, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, juga menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi agar program mampu memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat luas.¹⁴

Konteks pemerintahan daerah menempatkan strategi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi sebagai proses yang bersifat dinamis dan juga

¹³ Sintya Oktaviani and Beni Febriansyah, "Analisis Strategi Bisnis Guna Meningkatkan Daya Saing Pada Coffee Shop Di Bandar Lampung (Studi Kasus QALU)," 2023.

¹⁴ Hendy Surahman, *Manajemen Strategi: Konsep, Teori Dan Implementasi* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2026).

berkelanjutan. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan penting seperti analisis situasi daerah, identifikasi permasalahan, serta penentuan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan strategi dalam hal ini membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat, terarah, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pelaksanaan strategi memerlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dapat berjalan secara efektif tanpa tumpang tindih kebijakan. Evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting dalam proses strategi untuk menilai tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan serta penyesuaian kebijakan ke arah yang lebih optimal.

Pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) menunjukkan pentingnya strategi dalam menentukan keberhasilan suatu program pembangunan berbasis teknologi. Strategi yang tepat akan memastikan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal yang ada. Penerapan strategi yang baik tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.1.2 Definisi Strategi Menurut Para Ahli

Strategi merupakan konsep penting dalam manajemen dan administrasi publik yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah serta keberhasilan suatu organisasi. Pemahaman mengenai strategi tidak hanya terbatas pada definisi umum, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai pandangan ahli untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif. Chandler menjelaskan bahwa strategi merupakan penentu arah dan sasaran jangka panjang suatu organisasi yang diwujudkan melalui serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam menentukan tujuan organisasi sekaligus langkah-langkah yang harus diambil, terutama dalam memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Hitt, Ireland, dan Hoskisson memandang strategi sebagai kumpulan komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta terkoordinasi yang dirancang untuk memanfaatkan kompetensi inti dan mencapai keunggulan kompetitif. Pandangan ini menyoroti pentingnya sinergi antar elemen dalam organisasi serta kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Strategi tidak hanya dipahami sebagai perencanaan, tetapi juga sebagai proses pelaksanaan yang terkoordinasi untuk menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

Rothaermel mendefinisikan strategi sebagai rangkaian tindakan yang diarahkan oleh organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan kinerja unggul dibandingkan pihak lain. Definisi ini menekankan aspek persaingan serta keberlanjutan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Strategi menjadi alat bagi organisasi tidak hanya untuk mencapai keberhasilan sesaat, tetapi juga untuk mempertahankan posisi unggul secara konsisten melalui tindakan yang terencana dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian perencanaan, keputusan, dan tindakan yang terintegrasi dalam organisasi untuk mengarahkan penggunaan sumber daya secara optimal guna mencapai

tujuan jangka panjang serta menciptakan keunggulan dan keberlanjutan kinerja organisasi.¹⁵

2.1.1.3 Teori Strategi

Teori strategi merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu organisasi mampu merancang dan melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi publik, strategi tidak hanya dipahami sebagai proses penyusunan rencana, tetapi juga sebagai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, keberhasilan suatu strategi tidak hanya diukur dari baiknya perencanaan, tetapi juga dari kualitas implementasi serta hasil yang dicapai.

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Richard Rumelt (2011) sebagai pisau analisis utama. Teori Rumelt dipilih karena mampu mengevaluasi kualitas suatu strategi secara komprehensif. Adapun empat kriteria utama strategi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Konsistensi (*consistency*), yaitu kesesuaian antara tujuan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan organisasi. Suatu strategi dikatakan konsisten apabila seluruh program yang dijalankan memiliki arah yang sama dan tidak saling bertentangan. Konsistensi juga menunjukkan adanya keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam

¹⁵ Aditya Wardhana, *Strategi dan Kebijakan Bisnis di Era Digital* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).

¹⁶ Arman Maulana, *Manajemen Strategi* (Bandung: Azka Publisher, 2023).

¹⁷ Rumelt, Richard P. *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. (New York: Crown Business, 2011).

penelitian ini, aspek konsistensi digunakan untuk menganalisis apakah strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam program Teknologi Tepat Guna telah selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan.

2. Kesesuaian (*consonance*), yaitu kemampuan strategi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta dinamika yang terjadi. Strategi yang baik harus mampu merespons perubahan lingkungan eksternal dan memanfaatkan potensi lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, aspek kesesuaian digunakan untuk menganalisis apakah teknologi yang diberikan melalui program Teknologi Tepat Guna benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, serta potensi sektor pertanian di Aceh.
3. Manfaat atau keunggulan (*advantage*). Rumelt menjelaskan bahwa strategi harus mampu menghasilkan nilai tambah atau keunggulan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun penerima manfaat. Dalam sektor publik, manfaat tersebut dapat berupa meningkatnya kualitas pelayanan, efisiensi pelaksanaan program, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan aspek manfaat untuk menilai sejauh mana program Teknologi Tepat Guna mampu memberikan dampak terhadap produktivitas, efisiensi usaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat sebagai tujuan utama program.
4. Kelayakan (*feasibility*), yaitu kemampuan organisasi dalam melaksanakan strategi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Strategi yang baik harus realistis, dapat dilaksanakan, serta didukung oleh sumber daya manusia, anggaran,

kelembagaan, teknologi, dan sarana pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, aspek kelayakan digunakan untuk menganalisis apakah implementasi program Teknologi Tepat Guna telah didukung oleh pendampingan yang memadai, keberadaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), ketersediaan anggaran, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang diberikan.

Dalam penelitian ini, teori Rumelt digunakan sebagai landasan untuk menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam implementasi program Teknologi Tepat Guna. Analisis difokuskan pada bagaimana konsistensi kebijakan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, manfaat yang dihasilkan, serta kelayakan implementasi program. Melalui kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana strategi yang diterapkan telah berjalan secara efektif maupun berbagai faktor yang menyebabkan program Teknologi Tepat Guna belum mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Strategi

Strategi dalam organisasi memiliki berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat organisasi, serta pendekatan yang digunakan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai berbagai alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Maulana strategi organisasi secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu: ¹⁸

¹⁸ Arman Maulana, *Manajemen Strategi* (Bandung: Azka Publisher, 2023).

1. Strategi pertumbuhan (*growth strategy*) merupakan strategi yang berorientasi pada pengembangan organisasi melalui peningkatan kapasitas, perluasan kegiatan, serta inovasi di berbagai bidang. Strategi ini umumnya diterapkan ketika organisasi memiliki peluang besar untuk berkembang dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Penerapan strategi pertumbuhan dapat dilakukan melalui diversifikasi program, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi.
 2. Strategi stabilitas (*stability strategy*) berfokus pada upaya mempertahankan kondisi organisasi yang telah berjalan dengan baik dan relatif stabil. Strategi ini biasanya diterapkan ketika organisasi berada dalam posisi yang cukup kuat dan tidak menghadapi tekanan perubahan yang signifikan. Fokus utama strategi stabilitas adalah menjaga kinerja agar tetap konsisten melalui perbaikan secara bertahap tanpa melakukan perubahan besar.
 3. Strategi pengurangan (*retrenchment strategy*) merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengurangi aktivitas atau program tertentu yang dinilai kurang efektif atau tidak memberikan manfaat optimal. Langkah ini biasanya diambil ketika organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya atau penurunan kinerja. Pengurangan dapat dilakukan melalui efisiensi anggaran, restrukturisasi organisasi, atau penghentian program yang tidak prioritas.
- Strategi diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya dalam organisasi, yaitu: ¹⁹

1. Strategi korporat (*corporate strategy*) merupakan strategi yang berkaitan dengan arah dan tujuan organisasi secara menyeluruh. Strategi ini mencakup penentuan visi, misi, serta kebijakan umum yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas

¹⁹ Ibid, Arman Maulana.

organisasi. Pada tingkat ini, organisasi menetapkan bidang-bidang utama yang akan dikembangkan serta menentukan prioritas dalam penggunaan sumber daya. Strategi korporat berperan penting dalam memberikan arah jangka panjang serta memastikan bahwa organisasi bergerak menuju tujuan yang sama.

2. Strategi bisnis (*business strategy*) berfokus pada bagaimana organisasi mencapai keunggulan dalam bidang tertentu atau dalam menjalankan fungsi utamanya. Strategi ini berkaitan dengan upaya organisasi dalam menciptakan nilai tambah serta meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, organisasi menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau masyarakat melalui layanan yang berkualitas. Strategi bisnis juga mencakup penentuan posisi organisasi dalam lingkungan persaingan serta bagaimana mempertahankan keunggulan tersebut secara berkelanjutan.
3. Strategi fungsional (*functional strategy*) merupakan strategi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan pemasaran. Strategi ini bersifat lebih teknis dan operasional, serta berfungsi untuk mendukung pelaksanaan strategi pada tingkat yang lebih tinggi. Setiap unit kerja memiliki strategi fungsional yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keberhasilan strategi fungsional sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi.

Strategi dikelompokkan berdasarkan pendekatannya, yaitu:²⁰

1. Strategi inovasi menekankan pada upaya penciptaan gagasan, metode, atau sistem baru yang mampu meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman serta tuntutan perubahan yang semakin cepat. Melalui inovasi, organisasi dapat menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Strategi kolaborasi berfokus pada pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Kerja sama ini dapat melibatkan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, serta pengalaman yang memperkuat kapasitas organisasi.
3. Strategi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, serta kemandirian sumber daya yang dimiliki organisasi. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia, tetapi juga mencakup pemanfaatan potensi lain yang dimiliki organisasi secara maksimal. Melalui strategi ini, organisasi dapat meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat daya saing secara berkelanjutan.
4. Strategi adaptif menekankan pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat dan tidak pasti. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk selalu responsif dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan. Organisasi yang adaptif akan

²⁰ Ibid, Arman Maulana.

lebih mampu bertahan sekaligus berkembang karena mampu mengantisipasi perubahan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Strategi juga dapat dibedakan berdasarkan orientasinya, yaitu: ²¹

1. Strategi jangka pendek, yang berfokus pada pencapaian tujuan dalam waktu relatif singkat;
2. Strategi jangka menengah, yang menjadi penghubung antara strategi jangka pendek dan jangka panjang;
3. Strategi jangka panjang, yang berorientasi pada pencapaian tujuan utama organisasi di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, jenis-jenis strategi menunjukkan bahwa organisasi memiliki berbagai pilihan pendekatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi yang tepat sangat bergantung pada kondisi internal organisasi, dinamika lingkungan eksternal, serta tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis strategi menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merujuk pada peningkatan aliran penerimaan ekonomi baik tunai maupun non-tunai yang diperoleh rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli dan taraf hidup. Dalam perspektif pembangunan, peningkatan pendapatan tidak hanya mencakup aspek moneter, tetapi juga peningkatan akses terhadap sumber daya, pengurangan kerentanan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. ²²

²¹ Arman Maulana, *Manajemen Strategi* (Bandung: Azka Publisher, 2023).

²² Alfiansyah et al., *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

Peningkatan pendapatan dipandang sebagai tujuan akhir (*ultimate goal*) dari strategi DPMG Aceh melalui program Teknologi Tepat Guna (TTG). Peningkatan ini diharapkan tercapai melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang difasilitasi oleh adopsi Teknologi Tepat Guna.²³

Indikator peningkatan pendapatan masyarakat dalam konteks program Teknologi Tepat Guna dapat diukur melalui:

1. Peningkatan nilai ekonomi (pertambahan pendapatan tunai, peningkatan keuntungan usaha, penghematan biaya produksi).
2. Peningkatan produktivitas dan efisiensi (peningkatan output per satuan waktu, pengurangan beban kerja).
3. Peningkatan kualitas produk dan nilai tambah.
4. Diversifikasi sumber pendapatan.

Peran DPMG Aceh dalam konteks ini adalah sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem yang kondusif melalui program Teknologi Tepat Guna, sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.3 Teknologi Tepat Guna (TTG)

Teknologi Tepat Guna (TTG) didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat; bersifat praktis, mudah dioperasikan, dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung (Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017). Berbeda dengan teknologi

²³ Soebianto, Mardikanto, and Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.

tinggi yang kompleks, Teknologi Tepat Guna menekankan pada kesesuaian dengan kebutuhan lokal, kemudahan perawatan, dan keberlanjutan.²⁴

Dalam penelitian ini, Teknologi Tepat Guna diposisikan sebagai instrumen atau alat kebijakan utama yang digunakan oleh DPMG Aceh untuk menjalankan strateginya guna mencapai tujuan peningkatan pendapatan masyarakat. Teknologi Tepat Guna bukan hanya sekadar alat (*hardware*), tetapi merupakan sebuah sistem intervensi yang mencakup aspek perangkat lunak (*software*) dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan sumber daya manusia (*brainware*) dalam mengoperasikan dan mengembangkan teknologi tersebut.²⁵

Kriteria efektivitas Teknologi Tepat Guna meliputi:

1. Kesesuaian dengan kebutuhan potensi lokal masyarakat Aceh di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga.
2. Kemudahan dan keterjangkauan dari segi biaya pengadaan dan perawatan.
3. Keberlanjutan teknologi harus ramah lingkungan dengan dukungan ketersediaan bahan baku lokal.
4. Nilai tambah ekonomi mampu meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, DPMG Aceh berperan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab dalam identifikasi teknologi, pengembangan

²⁴ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, "Permendagri No. 23 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*, vol. 1, 2017.

²⁵ Setyawan Adhi Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna*, ed. Guepedia/La, *Guepedia*, vol. 3, 2021.

kapasitas, pembinaan kelembagaan pendukung (Posyantek), dan diseminasi inovasi melalui pameran dan lomba Teknologi Tepat Guna.

Dengan demikian, Teknologi Tepat Guna dalam penelitian ini dipandang sebagai sebuah sistem intervensi strategis yang terencana, di mana setiap komponennya mulai dari pemilihan teknologi hingga model pendampingan merupakan keputusan strategis yang diambil oleh DPMG Aceh dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.



2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi yang telah ada, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat orisinalitas dan kebaruan ilmiah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori/ Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian/ Celah Studi Untuk penelitian Kedepan
1.	Dimas Aditya Pratama Widya (2023), IPDN	Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Inovasi Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kapuas	Menganalisis pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kapuas	Teori pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto (bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, bina kelembagaan).	Kualitatif deskriptif.	Program Teknologi Tepat Guna merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, namun pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan dana, kreativitas masyarakat, dan sumber daya lokal.	E: Lokasi penelitian penulis dilakukan di DPMG Aceh 2025, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kapuas, Kalimantan Tengah 2023. T: Penelitian penulis menggunakan Teori strategi, sedangkan Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan. P: Penelitian penulis fokus pada strategi DPMG Aceh melalui Teknologi Tepat Guna, sementara penelitian ini

							fokus pada masyarakat penerima manfaat. ²⁶
2.	Novi Diah Wulandari & Winike Kushindrajati Aprilia (2022)	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Mengembangkan Potensi Masyarakat melalui Kemajuan UMKM	Mengkaji pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM	Teori partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal.	Kualitatif deskriptif.	Teknologi Tepat Guna dapat meningkatkan kemampuan produksi dan daya saing UMKM, namun partisipasi masyarakat masih terbatas.	E: Lokasi penelitian penulis dilakukan di DPMG Aceh 2025, sedangkan penelitian ini di Jawa Tengah 2022. T: Penelitian penulis menggunakan Teori strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. P: Penelitian penulis fokus pada strategi DPMG Aceh melalui Teknologi Tepat Guna, sedangkan penelitian ini fokus pada penguatan UMKM. ²⁷

²⁶ Dimas Aditya P. Widya. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Inovasi TTG di Kabupaten Kapuas. Repositori IPDN.

²⁷ Novi Diah Wulandari et al., "Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Masyarakat Melalui Kemajuan Umkm," *Kopemas* 3 (2022): 340–

3.	Yayi & Fitriani (2025)	Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Teknologi	Menganalisis peran dan strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi.	Teori tata kelola partisipatif (<i>Participatory Governance</i>).	Kualitatif studi kasus.	Pemerintah desa berperan memperluas akses teknologi bagi masyarakat melalui pelatihan, namun dukungan kelembagaan masih lemah.	E: Lokasi penelitian penulis dilakukan di DPMG Aceh 2025, sementara penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Jawa 2025. T: Penelitian penulis menggunakan Teori strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tata kelola partisipatif. P: Penelitian penulis fokus pada strategi DPMG Aceh melalui Teknologi Tepat Guna, sementara penelitian ini fokus pada peran pemerintah desa. ²⁸
4.	Agil Zuhairi (2025)	Pengaruh Teknologi Tepat Guna terhadap Peningkatan Produktivitas UMKM Pedesaan	Mengukur pengaruh Teknologi Tepat Guna terhadap produktivitas	Konsep inovasi teknologi dan kewirausahaan sosial.	Deskriptif kuantitatif.	Program Teknologi Tepat Guna berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan	E: Lokasi penelitian penulis dilakukan di DPMG Aceh 2025, sedangkan penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah 2025.

²⁸ Yayi & Fitriani. (2025). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Teknologi. Jurnal Neptunus FEB.

			dan nilai tambah ekonomi UMKM			nilai tambah ekonomi UMKM pedesaan.	T: Penelitian penulis menggunakan Teori strategi, sementara penelitian ini menggunakan konsep inovasi teknologi. P: Penelitian penulis fokus pada strategi DPMG Aceh melalui Teknologi Tepat Guna, sementara penelitian ini hanya mengukur dampak ekonomi Teknologi Tepat Guna pada UMKM. ²⁹
5.	Megawati & Adianto (2021)	Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Menganalisis praktik terbaik pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan	Teori <i>Best Practice</i> (Prasojo, 2007) dan pemberdayaan berbasis kelembagaan desa	Kualitatif Studi Kasus	Penerapan Teknologi Tepat Guna berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, namun	E: Lokasi penelitian penulis dilakukan di DPMG Aceh 2025, sedangkan penelitian ini dilakukan di Jawa Timur. T: Penelitian penulis menggunakan Teori strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori

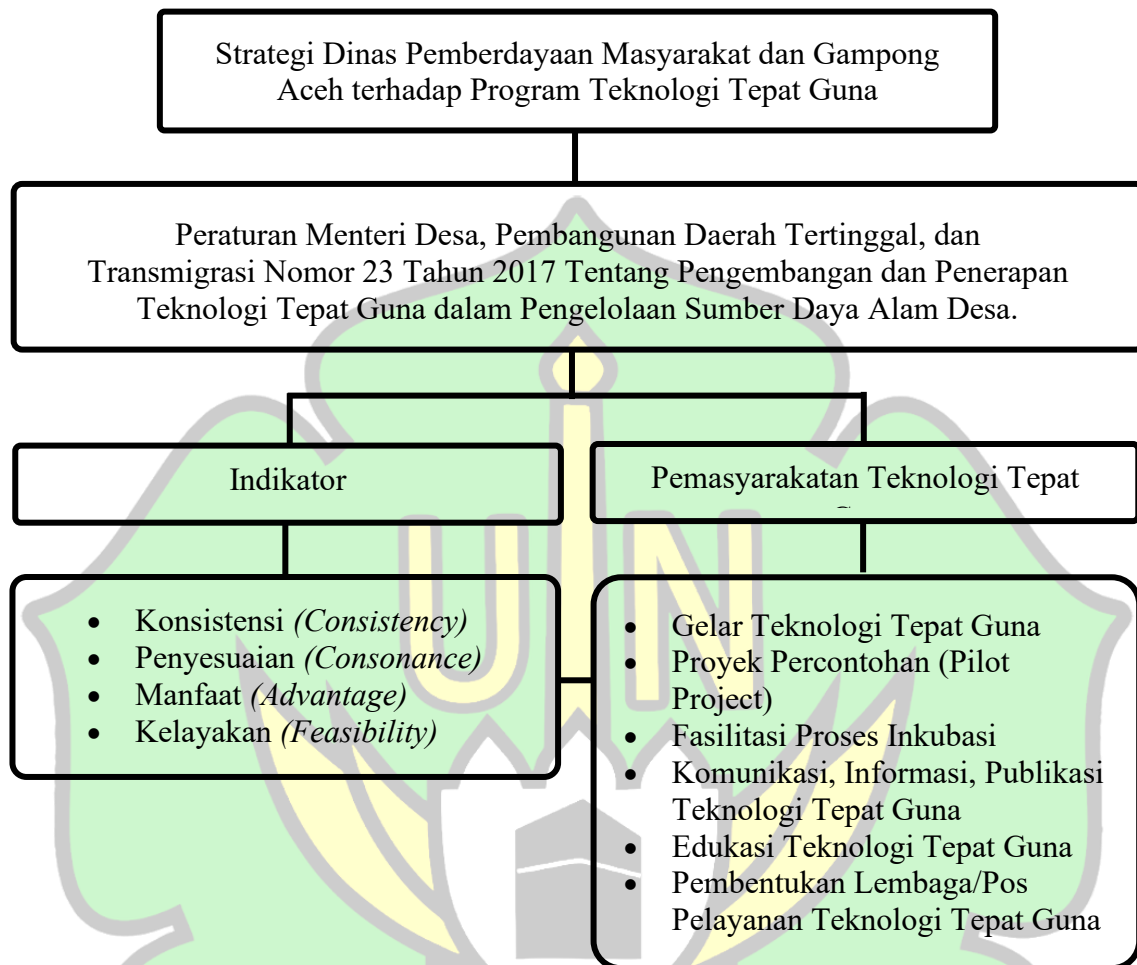
²⁹ Agil Zuhairi. (2025). Pengembangan Program TTG dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. Jurnal Daya Saing UNS.

			sumber daya desa			masih terkendala strategi pemasaran, legalitas, dan anggaran	<i>Best Practice</i> dan pemberdayaan kelembagaan . P: Penelitian penulis fokus pada strategi kelembagaan DPMG Aceh melalui Teknologi Tepat Guna, sedangkan penelitian ini fokus pada peran BUMDes. ³⁰
--	--	--	------------------	--	--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti 2025

³⁰ Megawati & Adianto. (2021). Peran Teknologi Tepat Guna dalam Pemberdayaan Desa melalui Penguatan BUMDes. Jurnal Ekonomi dan Sosial UB.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian ini yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program Teknologi Tepat Guna. Sesuai dengan pendapat Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari fenomena yang diteliti secara sistematis dan faktual. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³¹

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2019).

3.2 Fokus Penelitian

Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Strategi DPMG Aceh

No.	Dimensi	Indikator
1.	Strategi Richard P. Rumelt (2011)	a. Konsistensi (<i>Consistency</i>) b. Penyesuaian (<i>Consonance</i>) c. Manfaat (<i>Advantage</i>) d. Kelayakan (<i>Feasibility</i>)

Sumber: Richard P. Rumelt (2011)

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, yang berlokasi di Kota Banda Aceh sebagai pusat pengelolaan dan pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPMG Aceh merupakan *leading sector* dalam implementasi program Teknologi Tepat Guna di tingkat provinsi. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu mulai pada bulan April sampai Juni 2026.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak DPMG Aceh serta penerima manfaat Teknologi Tepat Guna di lapangan.
2. Data Sekunder, berupa dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, DPMG Aceh, Website DPMG Aceh, serta literatur ilmiah terkait strategi dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, disertai dengan pencatatan sistematis terhadap keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) di DPMG Aceh. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelatihan, pelaksanaan lomba inovasi TTG, serta pemanfaatan alat TTG oleh masyarakat di beberapa wilayah sasaran.³²

Observasi juga dilakukan terhadap kondisi riil penggunaan alat TTG di lapangan, seperti tingkat pemanfaatan alat oleh masyarakat, kesesuaian teknologi dengan kebutuhan petani, serta kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaannya. Peneliti juga mengamati interaksi antara pihak DPMG Aceh, Posyantek, dan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan program.

2. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam tentang strategi DPMG Aceh dalam implementasi program Teknologi Tepat Guna (TTG). Pedoman wawancara disusun berdasarkan kriteria manajemen strategi Rumelt. Menurut Sugiyono, wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan

³² Ibid, Sugiyono

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.³³

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen pendukung, seperti pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya, alat perekam suara untuk mendokumentasikan hasil wawancara, serta buku catatan lapangan untuk mencatat poin-poin penting, ekspresi, dan situasi selama proses wawancara berlangsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan perangkat dokumentasi seperti kamera atau telepon genggam untuk mendukung pengumpulan data. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh serta memudahkan peneliti dalam proses analisis data selanjutnya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus meningkatkan keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder yang dapat memperkuat temuan penelitian serta menjadi bahan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan.³⁴

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi DPMG Aceh (laporan kegiatan, data program Teknologi Tepat Guna, dan arsip kebijakan), foto kegiatan pelatihan dan lomba Teknologi Tepat Guna. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung lainnya

³³ Ibid, Sugiyono

³⁴ Ibid, Sugiyono

seperti peraturan terkait serta laporan tahunan. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna.

3.6 Informan Penelitian

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.³⁵ Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan karakteristik, keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu aparatur DPMG Aceh, inovator, peserta Lomba Teknologi Tepat Guna, dan masyarakat penerima manfaat Program Teknologi Tepat Guna. Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Aceh Besar karena berdasarkan data penelitian, daerah tersebut memiliki jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang relatif paling banyak serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan TTG. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bahwa Aceh Besar memiliki pengalaman dan aktivitas program yang memadai untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan strategi DPMG Aceh dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Informan dari unsur pemerintah dipilih karena memiliki keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan Program TTG, sedangkan inovator dan peserta lomba dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam pengembangan serta pelaksanaan kegiatan TTG. Masyarakat penerima manfaat dipilih berdasarkan pengalaman menerima dan menggunakan teknologi dalam kegiatan produktif, khususnya sektor pertanian. Pemilihan informan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara statistik, tetapi untuk

³⁵ Ibid, Sugiyono

memperoleh data yang mendalam berdasarkan pengalaman pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program. Pemusatan informan di Kabupaten Aceh Besar diharapkan memberikan data yang lebih relevan dan mendalam mengenai strategi, pelaksanaan, pemanfaatan, serta kendala Program TTG.

Adapun daftar informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Alasan Pemilihan	Jumlah
1.	Kepala Sub Bagian Program Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh	Memberikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program dari perspektif internal DPMG Aceh.	1 orang
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh	Menjelaskan strategi, kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, serta kendala pengembangan TTG pada tingkat provinsi.	1 orang
3.	Staf Posyantek Provinsi	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis, pendampingan, pemanfaatan, dan keberlanjutan teknologi di masyarakat.	1 orang
4.	Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG)	Memberikan perspektif mengenai proses pengembangan inovasi, dukungan pemerintah, serta peluang dan kendala penerapan teknologi.	1 orang
5.	Peserta Lomba/Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Memberikan informasi mengenai pengalaman mengikuti kegiatan, proses persiapan inovasi, dukungan program, dan keterlibatan masyarakat.	2 orang
6.	Masyarakat Penerima Manfaat Teknologi Tepat Guna (Petani)	Memberikan informasi langsung mengenai kesesuaian teknologi, kemudahan penggunaan, manfaat, kendala, serta keberlanjutan pemanfaatan alat.	4 orang
Total			10 orang

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Adapun untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, meliputi:³⁶

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang memiliki sudut pandang berbeda. Narasumber tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan informasi yang disampaikan.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga penggunaan beberapa metode sekaligus dapat saling melengkapi. Data yang diperoleh melalui wawancara dapat diperkuat dengan hasil observasi maupun bukti dokumentasi yang relevan.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Pengumpulan data secara berulang memungkinkan peneliti untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. Perbedaan waktu pengambilan data juga dapat membantu mengidentifikasi perubahan kondisi atau dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih akurat serta mampu menggambarkan situasi secara lebih menyeluruh dan mendalam.

³⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D" (Bandung: Alfabeta, 2019).

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahap utama, yaitu: ³⁷

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari lapangan supaya data menjadi lebih terorganisir dan fokus pada aspek yang relevan, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan melalui:

- a. Membuat ringkasan data hasil wawancara dan observasi
- b. Mengkode data berdasarkan tema-tema strategi DPMG Aceh
- c. Memilah data yang relevan dengan kriteria Rumelt

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data meliputi pengorganisasian data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau jaringan yang memudahkan penarikan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui:

- a. Penyusunan narasi deskriptif strategi DPMG Aceh
- b. Pembuatan matriks analisis berdasarkan kriteria Rumelt
- c. Penyajian tabel tematik implementasi program Teknologi Tepat Guna
- d. Pengorganisasian data dalam bentuk diagram alur strategi

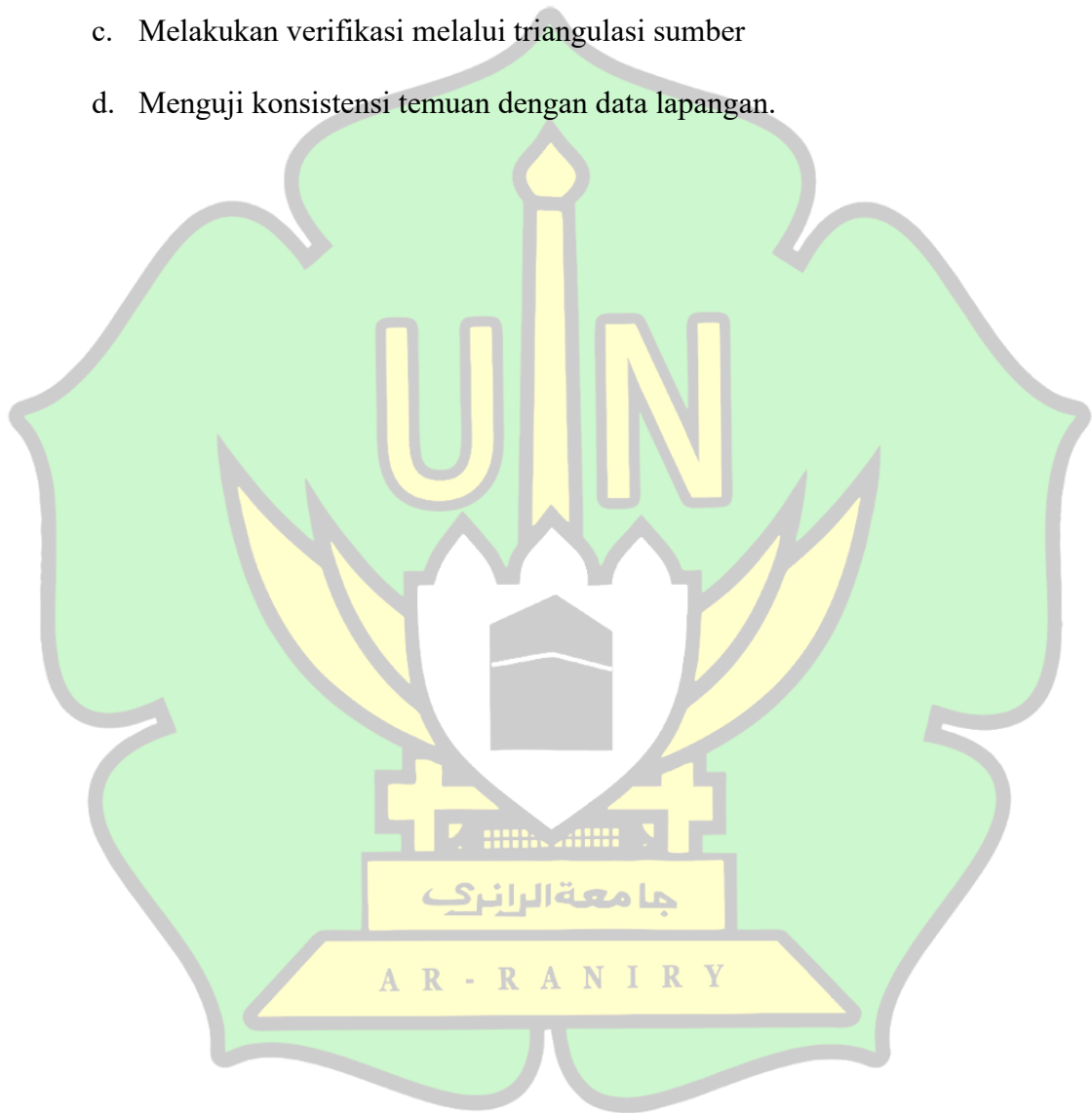
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah proses menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan, lalu melakukan verifikasi dan pengujian validitas

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2019).

untuk memastikan bahwa makna dan temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, tahap ini meliputi:

- a. Menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis
- b. Mengaitkan temuan dengan teori manajemen strategi
- c. Melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber
- d. Menguji konsistensi temuan dengan data lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya pada tingkat mukim dan gampong. Keberadaan lembaga ini tidak terlepas dari dinamika panjang perkembangan kebijakan pembangunan desa di Indonesia yang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Dalam konteks administrasi publik, perubahan kelembagaan yang terjadi menunjukkan adanya proses adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Seiring dengan perkembangan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, kebijakan pembangunan desa mengalami transformasi baik dari segi pendekatan maupun kelembagaan yang mengelolanya.³⁸

Secara historis, konsep pembangunan masyarakat desa di Indonesia mulai mendapat perhatian serius setelah adanya pengaruh pemikiran *community development* yang diperkenalkan melalui kajian internasional, termasuk hasil studi para ahli yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi menjadi kebijakan nasional, yang

³⁸ DPMG Aceh, Profil Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/profil-dpmg> pada 22 April 2026

ditandai dengan dimasukkannya program pembangunan masyarakat desa dalam agenda pembangunan lima tahunan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II. Sejak saat itu, pembangunan masyarakat desa menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang terus mengalami penyempurnaan.

Perkembangan kelembagaan yang menangani pembangunan masyarakat desa mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Pada masa Kabinet Kerja II, pemerintah mulai melakukan penataan organisasi melalui penerbitan peraturan presiden yang mengatur penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa. Selanjutnya, pada masa Kabinet Dwikora, kedudukan lembaga yang menangani pembangunan masyarakat desa ditingkatkan menjadi departemen tersendiri, yang menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini. Namun, pada masa Kabinet Ampera dan periode setelahnya, struktur kelembagaan kembali mengalami penyesuaian dengan ditempatkannya fungsi pembangunan masyarakat desa di bawah Departemen Dalam Negeri. Perubahan ini mencerminkan dinamika kebijakan publik yang berupaya menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.³⁹

Memasuki era otonomi daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan masyarakat desa. Kewenangan yang sebelumnya terpusat mulai didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki peran yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-

³⁹ DPMG Aceh, Profil Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/profil-dpmg> pada 22 April 2026

masing. Di Provinsi Aceh, perubahan kelembagaan ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 5 Tahun 2007 yang mengubah nomenklatur menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Selanjutnya, melalui Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018, kelembagaan tersebut kembali disempurnakan menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Secara geografis, DPMG Aceh berlokasi di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. E-19, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Lokasi ini berada di pusat pemerintahan Provinsi Aceh, sehingga memudahkan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai *leading sector* dalam pemberdayaan masyarakat gampong, DPMG Aceh memiliki tanggung jawab yang besar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program strategis yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah program Teknologi Tepat Guna (TTG), yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.⁴⁰

DPMG Aceh memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera. Visi ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah, yakni:

⁴⁰ DPMG Aceh, Alamat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/alamat> pada 22 April 2026

1. Islami, Masyarakat Aceh yang islami dicirikan dengan terlaksananya, pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam semua sendi kehidupan dan terciptanya kerukunan hidup beragama
 2. Maju, kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
 3. Damai, sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman.
 4. Sejahtera, sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual
- DPMG Aceh menetapkan beberapa misi, antara lain: ⁴¹
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami.
 2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual
 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
 4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu.
 5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata.
 6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Tugas pokok DPMG Aceh adalah “melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, serta

⁴¹ DPMG Aceh, Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi> pada 22 April 2026

melaksanakan tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DPMG Aceh menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain: ⁴²

1. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan

⁴² DPMG Aceh, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dinas> pada 22 April 2026

gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Struktur organisasi DPMG Aceh terdiri dari beberapa bidang yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.⁴³

1. Sekretariat berperan dalam pengelolaan administrasi, keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan.
2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong bertanggung jawab dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi keuangan gampong, serta pengentasan kemiskinan.
3. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong berfokus pada pembinaan kelembagaan pemerintahan gampong dan pengembangan sarana prasarana.
4. Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Gampong memiliki peran dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan melestarikan nilai-nilai adat.
5. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan gampong serta

⁴³ DPMG Aceh, Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-bidang> pada 22 April 2026

pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu unit kerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Bidang ini bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di tingkat masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan, bidang ini berupaya mendorong pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi oleh masyarakat.

DPMG Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting dalam konteks implementasi program Teknologi Tepat Guna, di mana keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh memiliki struktur organisasi yang tersusun secara hirarkis dan fungsional. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan efektivitas koordinasi, pembagian tugas, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara terarah dan sistematis.

Berikut adalah struktur organisasi DPMG Aceh:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi DPMG Aceh

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
2.	Muhammad Nizar, S.STp., M. Si.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
3.	T. Zul Husni, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong
4.	Drs. Wardana, M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong
6.	Helmi Iskandar, S.Sos., M. Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong
7.	Mawardi Adami, S. Ag.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong
8.	Aldy Gunawan, S.STp., M.A.P.	Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong
9.	Cut Nurul Fitri, S.H.	Kepala Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong
10.	Muhammad Yusuf, S.Pd.	Kepala Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong
11.	Janiswar, S. Sos.	Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Mukim dan Gampong
12.	Musliadi, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Penataan Pemerintahan Mukim dan Gampong
13.	Jamalina Hasan, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong

14.	Edi Fadhil, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong / Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga
15.	Murni, S.Sos.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong
16.	Tuti Sulastri, S.E.	Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong
17.	Yulita Dewi, S.P.	Plt. Kasi Kerjasama Gampong
18.	Faisal, S.IP., M.M.	Kepala Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
19.	Misriani, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian Sekretariat
20.	Masyitah, S.E., M.Si.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/ Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset
21.	Fitriyana, S.STp.	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Sumber: Website Resmi DPMG Aceh.⁴⁴

4.1.2 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Program Teknologi Tepat Guna (TTG)

Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang dapat didukung melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi

⁴⁴ DPMG Aceh, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, diakses melalui <https://dpmg.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi> pada 22 April 2026

di Provinsi Aceh adalah sektor pertanian. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melaksanakan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) yang bertujuan meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan potensi lokal masyarakat.

Strategi DPMG Aceh dalam pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna difokuskan pada pengembangan inovasi masyarakat berbasis potensi lokal guna meningkatkan pendapatan ekonomi gampong, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian desa. Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai sarana pengembangan inovasi masyarakat, penguatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) sebagai pusat pelayanan dan pendampingan teknologi, optimalisasi potensi lokal melalui penciptaan teknologi yang memberikan nilai tambah terutama pada sektor pertanian, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pendampingan teknologi kepada masyarakat.

1. **Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi (*consistency*) merupakan salah satu indikator strategi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program dilaksanakan secara selaras antara tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam teori strategi Rumelt, konsistensi menunjukkan bahwa strategi yang baik harus memiliki arah yang jelas, tidak saling bertentangan antar kebijakan, serta mampu menjaga kesinambungan antara perencanaan dan implementasi. Indikator konsistensi digunakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh

menjalankan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan tujuan program, yaitu mendukung produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Teknologi Tepat Guna yang dijalankan oleh DPMG Aceh merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi yang sederhana, mudah diterapkan, serta diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, DPMG Aceh tidak hanya melaksanakan penyaluran teknologi, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan pendukung seperti Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), kegiatan expo, pembinaan masyarakat, penguatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), serta pendampingan teknis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa sebelum pelaksanaan program dilakukan, DPMG Aceh terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kondisi wilayah, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar program yang dijalankan dapat menyesuaikan kondisi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh yang menyampaikan bahwa:

“Program Teknologi Tepat Guna yang kami jalankan sebenarnya tidak hanya fokus pada pemberian alat saja, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum penyaluran, kami biasanya melakukan identifikasi kebutuhan

melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga teknologi yang diberikan dapat disesuaikan dengan potensi wilayah.”⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual strategi yang diterapkan oleh DPMG Aceh telah memiliki arah yang jelas dan berupaya menjaga kesesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Identifikasi kebutuhan sebelum pelaksanaan menjadi bagian penting agar teknologi yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMG Aceh diperoleh informasi bahwa penyaluran alat Teknologi Tepat Guna terakhir dilakukan pada tahun 2021. Namun demikian, Program TTG tidak berhenti dan tetap dilaksanakan melalui kegiatan pendukung lainnya seperti Gelar TTG, expo inovasi, pembinaan, serta penguatan Posyantek. Hal tersebut menunjukkan adanya keberlanjutan pelaksanaan program meskipun bentuk kegiatannya mengalami penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat (Petani) yang menyampaikan bahwa:

“Alat yang diberikan memang ada sejak lama, tetapi tidak semuanya bisa kami pakai. Ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami sehingga akhirnya tidak digunakan dan berakhir disimpan.”⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program telah dirancang untuk mendukung produktivitas masyarakat, dalam pelaksanaannya

⁴⁵ Wawancara dengan Faisal, S.IP., M.M., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

⁴⁶ Wawancara dengan Ali, Penerima Manfaat TTG, pada 21 April 2026.

masih ditemukan ketidaksesuaian antara teknologi yang diberikan dengan kebutuhan pengguna. Akibatnya, tujuan program belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Posyantek Provinsi yang menyampaikan bahwa:

“Kami juga mengadakan kegiatan lomba dan expo Teknologi Tepat Guna tiap tahun, tetapi sebagian alat yang dikembangkan belum dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat karena masih terdapat kendala pada aspek perawatan dan layanan teknis di daerah.”⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan inovasi melalui Gelar TTG belum seluruhnya menghasilkan teknologi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam beberapa kondisi, teknologi yang dikembangkan masih mengalami kendala pada aspek penggunaan dan dukungan teknis sehingga belum memberikan manfaat secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator konsistensi pada strategi DPMG Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna telah terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program. Namun pada tahap implementasi masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait kesesuaian teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada proses identifikasi kebutuhan, pendampingan penggunaan teknologi, serta evaluasi program agar pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna dapat berjalan lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁴⁷ Wawancara dengan Fakhrol Razi, ST, M.M., Staf Posyantek Provinsi Aceh, pada 20 April 2026.

2. Penyesuaian (*Consonance*)

Penyesuaian (*consonance*) merupakan indikator strategi yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan strategi yang dijalankan dengan kondisi lingkungan, perubahan kebutuhan, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam teori strategi Rumelt, penyesuaian menunjukkan bahwa strategi yang baik harus mampu merespons perkembangan situasi sehingga kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, indikator penyesuaian digunakan untuk menganalisis sejauh mana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat penerima manfaat.

Program Teknologi Tepat Guna pada dasarnya dirancang sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Konsep Teknologi Tepat Guna menekankan bahwa teknologi yang dikembangkan harus mudah digunakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ekonomis, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas produktifnya.

Berdasarkan hasil penelitian, DPMG Aceh telah melakukan beberapa upaya penyesuaian dalam pelaksanaan Program TTG. Upaya tersebut dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat, serta kegiatan monitoring setelah teknologi diterapkan. Langkah tersebut dilakukan agar teknologi yang diberikan tidak hanya menjadi bantuan fisik tetapi dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Teknologi Tepat Guna yang menyampaikan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan di lapangan, kami tidak hanya menyerahkan alat, tetapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kami juga melakukan monitoring untuk memastikan alat tersebut digunakan.”*⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPMG Aceh telah berupaya menyesuaikan pelaksanaan program melalui pendekatan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan dan monitoring dilakukan sebagai bentuk adaptasi agar masyarakat dapat memahami penggunaan teknologi yang diberikan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses penyesuaian tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun pelatihan dan monitoring telah dilakukan, pada praktiknya masih ditemukan masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal karena teknologi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat (petani), beliau mengungkapkan:

*“Kalau alatnya sesuai kebutuhan mungkin bisa membantu pekerjaan kami, tapi kenyataannya ada alat yang tidak terlalu cocok dengan kondisi yang kami hadapi di lapangan.”*⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara teknologi yang diberikan dengan kondisi nyata masyarakat. Hal ini

⁴⁸ Wawancara dengan Fitriyana, S.STp., Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

⁴⁹ Wawancara dengan Nurjannah, Penerima Manfaat TTG (Petani), pada 22 April 2026.

menyebabkan pemanfaatan teknologi menjadi kurang optimal dan tujuan peningkatan produktivitas dan pendapatan juga belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat (petani) penerima manfaat lainnya yang menyampaikan bahwa:

“Kadang alatnya memang ada, tapi penggunaannya tidak berlanjut karena tidak semua orang paham cara memakai dan menyesuakannya dengan pekerjaan sehari-hari.”⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian tidak hanya berkaitan dengan pemberian teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi tersebut secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian program belum berjalan secara menyeluruh. Strategi yang adaptif seharusnya mampu menyesuaikan bentuk intervensi dengan kondisi masyarakat sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Apabila dikaitkan dengan teori Rumelt, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi DPMG Aceh belum sepenuhnya memenuhi indikator *consonance*, karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator penyesuaian pada strategi DPMG Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna telah terlihat melalui adanya pelatihan, monitoring, dan identifikasi kebutuhan masyarakat.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibrahim, Penerima Manfaat TTG (Petani), pada 22 April 2026.

Namun masih ditemukan beberapa kendala terkait kesesuaian teknologi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program agar pelaksanaan Program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Manfaat (*Advantage*)

Manfaat (*advantage*) merupakan salah satu indikator dalam teori strategi Rumelt yang digunakan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu memberikan nilai tambah, keunggulan, serta hasil nyata terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, indikator manfaat digunakan untuk melihat sejauh mana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melalui Program Teknologi Tepat Guna (TTG) mampu memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Program Teknologi Tepat Guna dirancang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta menciptakan peluang peningkatan hasil produksi. Dalam pelaksanaannya, teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat melalui pengurangan beban kerja, peningkatan efektivitas produksi, dan terbukanya peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, DPMG Aceh memandang bahwa keberhasilan Program Teknologi Tepat Guna tidak hanya diukur dari jumlah alat atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat setelah program berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi yang menyampaikan bahwa:

“Kami tidak ingin program ini hanya bersifat seremonial atau sekadar penyaluran bantuan saja. Yang kami kejar adalah dampaknya, yaitu bagaimana masyarakat bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, tapi kenyataan yang kita lihat sekarang tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.”⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual Program Teknologi Tepat Guna diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif.

Salah satu inovator Teknologi Tepat Guna yang mengikuti Gelar TTG Tahun 2023 di Jantho menjelaskan bahwa inovasi yang dikembangkannya berupa Mesin Pompa Air Tenaga Dayung dari Posyantek Maju Bersama, yaitu pompa air yang memanfaatkan kayuhan sepeda untuk menghasilkan energi listrik sehingga dapat menggerakkan mesin pompa air tanpa bergantung pada bahan bakar minyak maupun listrik PLN. Inovasi tersebut dirancang menggunakan sepeda bekas, dinamo bekas, dan beberapa komponen limbah lainnya, serta berhasil menjadi finalis pada ajang Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2023.

Sebagaimana disampaikan oleh inovator Teknologi Tepat Guna:

"Alat yang saya buat namanya Mesin Pompa Air Tenaga. Alat ini memanfaatkan kayuhan sepeda untuk menghasilkan listrik yang kemudian

⁵¹ Wawancara dengan Faisal, S.IP., M.M., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

menggerakkan pompa air. Pengerjaannya sekitar dua bulan dan alhamdulillah menjadi finalis pada Gelar TTG Tahun 2023 di Jantho."⁵²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa DPMG Aceh telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai inovasi Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Gelar TTG. Akan tetapi, keberhasilan menghasilkan inovasi maupun prestasi dalam perlombaan belum secara otomatis diikuti oleh keberhasilan implementasi teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Fadli dan Faisal selaku peserta Gelar Teknologi Tepat Guna yang tergabung dalam tim inovasi mewakili gampong. Keduanya menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam lomba dilakukan secara berkelompok karena setiap inovasi harus diwakili oleh sebuah tim.

Sebagaimana disampaikan oleh Fadli:

*"Kami mengikuti lomba sebagai satu tim mewakili gampong. Tugas kami membantu proses persiapan alat, memastikan alat dapat berfungsi dengan baik saat penilaian, serta menjelaskan cara kerja alat kepada dewan juri."*⁵³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Faisal yang menyatakan bahwa keberhasilan mengikuti Gelar TTG tidak hanya bergantung pada inovator, tetapi juga memerlukan kerja sama seluruh anggota tim dalam mempersiapkan inovasi yang akan dipresentasikan.

⁵² Wawancara dengan Darmawan, Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG), pada 29 Juli 2026.

⁵³ Wawancara dengan Fadli, Peserta Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), pada 29 Juli 2026.

*"Peserta lomba memang harus dalam bentuk tim yang mewakili gampong. Kami saling membantu mulai dari persiapan alat, pengangkutan, hingga mendampingi inovator saat proses penilaian berlangsung."*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna tidak hanya menjadi wadah bagi inovator untuk memperkenalkan hasil karyanya, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama antara anggota tim dalam mewakili gampong. Keterlibatan peserta dalam mendukung proses persiapan, demonstrasi, dan penyampaian informasi mengenai inovasi menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan Teknologi Tepat Guna yang difasilitasi oleh DPMG Aceh.

Salah satu tujuan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Untuk melihat manfaat tersebut, penelitian ini menggunakan data dokumentasi dari DPMG Aceh yang memuat perbandingan pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan alat TTG.

Tabel 4. 2 Perbandingan Pendapatan Petani Sebelum-Sesudah Memakai Alat Teknologi Tepat Guna

No.	Jenis Teknologi TTG	Pendapatan Sebelum TTG	Pendapatan Sesudah TTG
1.	Mesin Pembelah Biji Pinang	Rp. 24.500.000	Rp. 24.500.000
2.	Alat Penanam Jagung Mekanis	Rp. 23.800.000	Rp. 23.800.000
3.	Mesin Pencacah Gabah	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000

Sumber: Data DPMG (2026)

⁵⁴ Wawancara dengan Faisal, Peserta Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), pada 29 Juli 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2, tiga penerima manfaat yang tercatat dalam dokumentasi DPMG Aceh menunjukkan pendapatan yang sama sebelum dan sesudah menggunakan alat TTG. Pengguna mesin pembelah biji pinang memperoleh pendapatan sebesar Rp24.500.000 pada kedua periode, sedangkan pengguna alat penanam jagung mekanis memperoleh Rp23.800.000. Pengguna mesin pencacah gabah juga menunjukkan pendapatan sebesar Rp25.000.000 sebelum dan sesudah penggunaan teknologi.

Temuan dokumentasi tersebut perlu dilihat bersama dengan hasil wawancara terhadap masyarakat penerima manfaat. Salah seorang petani penerima manfaat menyampaikan:

“Pendapatan kami tidak banyak berubah. Alatnya ada, tapi karena tidak sesuai dan yang pakai pun tidak ada, jadi tidak terlalu membantu pekerjaan kami.”⁵⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan alat TTG belum secara otomatis menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Persoalan tidak hanya terletak pada tersedianya teknologi, tetapi juga pada kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna serta tingkat pemanfaatannya dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat cenderung tidak digunakan secara optimal sehingga tujuan peningkatan produktivitas dan pendapatan belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian teknologi yang telah disalurkan belum digunakan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan

⁵⁵ Wawancara dengan Hasan, Penerima Manfaat TTG (Petani), pada 22 April 2026.

manfaat ekonomi yang diharapkan dari program belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Program TTG tidak cukup diukur dari jumlah alat yang disalurkan atau keberhasilan inovasi dalam kegiatan Gelar TTG, tetapi perlu dilihat dari keberlanjutan pemanfaatan teknologi setelah diterima masyarakat. Pendampingan, kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna, kemampuan mengoperasikan alat, serta dukungan pemeliharaan menjadi aspek yang menentukan kebermanfaatan program di tingkat masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori strategi Richard P. Rumelt, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi DPMG Aceh pada aspek *advantage* belum sepenuhnya tercapai. Indikator *advantage* menekankan kemampuan strategi dalam menciptakan keunggulan atau manfaat yang dapat memberikan hasil lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Data dokumentasi DPMG Aceh menunjukkan bahwa pendapatan tiga penerima manfaat yang tercatat belum mengalami perubahan setelah menggunakan TTG. Kondisi tersebut diperkuat oleh keterangan penerima manfaat yang menyatakan bahwa teknologi yang tersedia belum banyak membantu pekerjaan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan strategi DPMG Aceh dalam Program TTG telah menghasilkan berbagai inovasi dan menyediakan teknologi bagi masyarakat, tetapi manfaat ekonominya belum terlihat secara optimal pada penerima manfaat yang terdokumentasi. Tidak adanya perubahan pendapatan pada tiga data penerima manfaat menunjukkan bahwa penyediaan teknologi belum secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut

berkaitan dengan kesesuaian teknologi, intensitas pemanfaatan, keberlanjutan penggunaan, serta pendampingan setelah alat diberikan..

4. Kelayakan (*Feasibility*)

Kelayakan (*feasibility*) merupakan salah satu indikator dalam teori strategi Rumelt yang digunakan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan dapat dilaksanakan secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan yang mendukung keberlangsungan program. Dalam konteks penelitian ini, indikator kelayakan digunakan untuk menganalisis sejauh mana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Secara konseptual, Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di DPMG Aceh telah dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta dukungan kelembagaan melalui Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) sebagai perpanjangan tangan di tingkat masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program juga didukung oleh tenaga aparatur yang bertugas dalam kegiatan pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan seperti Gelar TTG dan expo inovasi teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara kelembagaan DPMG Aceh memiliki struktur dan perangkat kerja yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas antara bidang teknis, pelaksana program, serta

dukungan dari Posyantek di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kelayakan pelaksanaan program secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Teknologi Tepat Guna yang menyampaikan bahwa:

“Kendala yang sering kami hadapi adalah keterbatasan tenaga pendamping dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Tidak semua lokasi bisa kami dampingi secara intensif.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari aspek kelayakan (*feasibility*), pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah kerja yang luas. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal di seluruh lokasi penerima manfaat, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi program di lapangan.

4.1.3 Faktor yang Menghambat Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam Pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dalam pelaksanaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh tidak hanya menghadapi berbagai keberhasilan, tetapi juga sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi program di lapangan. Hambatan tersebut muncul sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut

⁵⁶ Wawancara dengan Fitriyana, S.STp., Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

meliputi ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan pendampingan teknis, belum optimalnya peran Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil inovasi yang dihasilkan melalui lomba Teknologi Tepat Guna.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program, beliau menjelaskan:

"Kendala terbesar yang kami hadapi sebenarnya adalah menentukan jenis teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kadang usulan dari daerah sudah ada, tetapi setelah alat diberikan ternyata tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada juga alat yang akhirnya disimpan karena masyarakat merasa kurang membutuhkan atau belum mampu mengoperasikannya."⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi Program Teknologi Tepat Guna adalah ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat. Meskipun proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan sebelum penyaluran bantuan, dalam praktiknya masih ditemukan teknologi yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Akibatnya, sebagian alat tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan tidak digunakan sama sekali oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi kebutuhan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga efektivitas program menjadi berkurang.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh:

⁵⁷ Wawancara dengan Fitriyana, S.STp., Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

*"Kami berharap setiap alat yang diberikan benar-benar digunakan oleh masyarakat. Tetapi kenyataannya ada beberapa alat yang setelah diserahkan tidak lagi dimanfaatkan. Hal seperti ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami agar kedepan proses identifikasi kebutuhan lebih akurat. Namun, kendala lain yang kami hadapi adalah keterbatasan tenaga pendamping. Wilayah Aceh cukup luas, sementara jumlah petugas yang melakukan pembinaan masih terbatas. Akibatnya kami belum bisa melakukan pendampingan secara rutin kepada seluruh kelompok penerima manfaat."*⁵⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi strategi DPMG Aceh. Pendampingan merupakan bagian penting dalam keberhasilan Program Teknologi Tepat Guna karena masyarakat memerlukan bimbingan dalam penggunaan, perawatan, dan pengembangan teknologi. Keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan proses pembinaan tidak berlangsung secara berkesinambungan sehingga masyarakat mengalami kesulitan ketika menghadapi kendala teknis dalam penggunaan alat.

Kepala Seksi Program TTG menjelaskan:

*"Monitoring memang tetap kami lakukan, tetapi belum bisa dilakukan secara intensif karena keterbatasan anggaran dan personel."*⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan anggaran operasional serta jumlah personel menyebabkan DPMG Aceh belum mampu melakukan pengawasan secara berkala terhadap seluruh lokasi penerima bantuan. Kondisi ini mengakibatkan berbagai

⁵⁸ Wawancara dengan Fitriyana, S.STp., Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan Faisal, S.IP., M.M., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh, pada 20 April 2026.

permasalahan di lapangan tidak dapat segera ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Staf Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Provinsi Aceh:

*"Posyantek sebenarnya dibentuk untuk membantu masyarakat dalam penggunaan dan perawatan alat. Tetapi sampai sekarang belum semua kabupaten memiliki Posyantek yang aktif. Ada yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada juga yang belum berfungsi secara maksimal."*⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan Posyantek belum berjalan secara optimal di seluruh daerah. Padahal Posyantek memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan teknologi yang memberikan konsultasi, pendampingan, serta solusi terhadap berbagai permasalahan teknis yang dihadapi masyarakat. Belum optimalnya keberadaan Posyantek menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara merata sehingga efektivitas implementasi Program Teknologi Tepat Guna menjadi berkurang.

Staf Posyantek juga menambahkan:

*"Dalam kegiatan lomba TTG banyak muncul inovasi yang bagus. Tetapi setelah lomba selesai, sebagian besar inovasi tersebut tidak berlanjut karena belum ada dukungan untuk pengembangan maupun penerapan di masyarakat."*⁶¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan hasil inovasi masih menjadi salah satu kendala dalam implementasi Program Teknologi Tepat Guna. Berbagai inovasi yang dihasilkan melalui lomba belum seluruhnya dapat diterapkan

⁶⁰ Wawancara dengan Fakrul Razi, ST, M.M., Staf Posyantek Provinsi Aceh, pada 20 April 2026.

⁶¹ Wawancara dengan Fakrul Razi, ST, M.M., Staf Posyantek Provinsi Aceh, pada 20 April 2026.

dalam kehidupan masyarakat maupun dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, hasil inovasi lebih banyak berhenti pada tahap kompetisi dan belum mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat maupun meningkatkan pendapatan para inovator.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi Program Teknologi Tepat Guna masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan pendampingan dan monitoring, belum optimalnya fungsi Posyantek, serta belum berkelanjutannya hasil inovasi yang dihasilkan melalui lomba Teknologi Tepat Guna. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi belum berjalan secara optimal sehingga tujuan program untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat belum dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan strategi yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta peningkatan efektivitas pendampingan agar Program Teknologi Tepat Guna mampu memberikan manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) pada dasarnya telah disusun melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan jenis teknologi, pelaksanaan pelatihan, hingga monitoring dan evaluasi. Secara konseptual, tahapan tersebut telah mencerminkan proses

manajemen strategi sebagaimana dikemukakan oleh Chandler yang menekankan pentingnya penetapan tujuan jangka panjang melalui pengalokasian sumber daya secara tepat.⁶² Demikian pula menurut Surahman, keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh keterpaduan antara proses analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tahapan tersebut telah dirancang dengan baik, implementasinya belum mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan program.⁶³ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penyusunan strategi, melainkan pada efektivitas implementasinya di lapangan.

Analisis berdasarkan kriteria konsistensi (*consistency*) menurut Rumelt menunjukkan bahwa strategi DPMG Aceh secara normatif telah memiliki keselarasan antara tujuan, kebijakan, dan program yang dirancang. Tujuan program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan, penyelenggaraan lomba inovasi TTG, pembentukan Posyantek, serta penyaluran alat kepada masyarakat. Dari sisi dokumen kebijakan, tidak ditemukan adanya pertentangan antara tujuan dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Namun demikian, konsistensi tersebut belum tercermin pada tahap implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar teknologi yang telah disalurkan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konsistensi baru tercapai

⁶² Aditya Wardhana, *Strategi Dan Kebijakan Bisnis Di Era Digital* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).

⁶³ Hendy Surahman, *Manajemen Strategi: Konsep, Teori Dan Implementasi* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2026).

pada tingkat perencanaan, sedangkan pada tahap implementasi masih terjadi kesenjangan antara tujuan program dengan hasil yang diperoleh.⁶⁴ Menurut Rumelt, strategi yang konsisten tidak hanya menuntut keselarasan dokumen kebijakan, tetapi juga kesesuaian antara tindakan organisasi dan hasil yang ingin dicapai.⁶⁵ Oleh karena itu, strategi DPMG Aceh belum sepenuhnya memenuhi indikator *consistency* karena pelaksanaan program belum mampu merealisasikan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata.

Temuan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian Dimas Aditya Pratama Widya yang menyatakan bahwa program TTG mampu berjalan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.⁶⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program masih menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara teknologi yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan program tidak memberikan manfaat yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya melalui analisis konsistensi strategi menggunakan teori Rumelt.

Analisis terhadap indikator kesesuaian (*consonance*) menunjukkan bahwa strategi DPMG Aceh belum sepenuhnya mampu menyesuaikan program dengan kondisi eksternal dan kebutuhan riil masyarakat. Secara teoritis, Teknologi Tepat Guna harus

⁶⁴ Hendy Surahman, *Manajemen Strategi: Konsep, Teori Dan Implementasi* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2026).

⁶⁵ Rumelt, Richard P. *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. (New York: Crown Business, 2011).

⁶⁶ Dimas Aditya P. Widya. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Inovasi TTG di Kabupaten Kapuas*. Repositori IPDN.

disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya lokal, kemampuan pengguna, serta kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017. Hasil penelitian justru memperlihatkan bahwa beberapa alat yang dihasilkan melalui lomba maupun yang disalurkan kepada masyarakat tidak dapat digunakan karena desainnya kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Bahkan beberapa inovasi hanya berhenti pada tahap perlombaan dan tidak pernah diterapkan dalam aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi kebutuhan masyarakat belum dilakukan secara komprehensif sehingga strategi yang dirancang belum mampu beradaptasi dengan kondisi eksternal secara optimal. Dalam perspektif Rumelt, strategi yang baik harus mampu merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna.⁶⁷ Oleh sebab itu, aspek *consonance* dalam implementasi Program TTG masih tergolong rendah.

Temuan ini sekaligus memperkuat hasil penelitian Novi Diah Wulandari dan Winike Kushindrajati Aprilia yang menyatakan bahwa keberhasilan pemanfaatan TTG sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna.⁶⁸ Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga pada proses penentuan teknologi yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat.⁶⁹ Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kegagalan implementasi TTG dapat disebabkan oleh lemahnya kesesuaian strategi sejak tahap awal perencanaan.

⁶⁷ Rumelt, Richard P. *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. (New York: Crown Business, 2011).

⁶⁸ Novi Diah Wulandari et al., "Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Masyarakat Melalui Kemajuan Umkm," *Kopemas* 3 (2022): 340–48.

⁶⁹ Setyawan Adhi Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna*, ed. Guepedia/La, *Guepedia*, vol. 3, 2021.

Analisis terhadap indikator manfaat (*advantage*) menunjukkan bahwa Program TTG belum mampu menghasilkan keunggulan atau manfaat ekonomi sebagaimana yang menjadi tujuan utama program. Secara teoritis, keberadaan TTG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum tercapai karena sebagian besar alat tidak digunakan oleh masyarakat. Bahkan dalam kegiatan lomba TTG, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membuat alat, sementara inovasi tersebut tidak berlanjut menjadi teknologi yang dapat dimanfaatkan secara nyata. Akibatnya, anggaran yang telah dikeluarkan belum menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam perspektif Rumelt, suatu strategi dikatakan memiliki *advantage* apabila mampu menciptakan manfaat yang lebih besar dibandingkan sumber daya yang digunakan.⁷⁰ Berdasarkan temuan penelitian, indikator *advantage* belum terpenuhi karena *output* program belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Agil Zuhairi yang menyimpulkan bahwa penerapan TTG mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi UMKM pedesaan.⁷¹ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TTG sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi strategi. Pada penelitian ini, manfaat ekonomi

⁷⁰ Rumelt, Richard P. *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. (New York: Crown Business, 2011).

⁷¹ Agil Zuhairi. (2025). Pengembangan Program TTG dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Daya Saing UNS*.

tidak tercapai bukan karena konsep TTG tidak tepat, melainkan karena implementasinya belum mampu menghasilkan teknologi yang benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Analisis pada indikator kelayakan (*feasibility*) menunjukkan bahwa implementasi strategi DPMG Aceh masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Keterbatasan tenaga pendamping, belum optimalnya peran Posyantek, serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat alat menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program. Selain itu, penggunaan anggaran dalam kegiatan Teknologi Tepat Guna juga dinilai belum efektif, terutama dalam kegiatan lomba yang tidak menghasilkan *output* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum sepenuhnya realistis apabila dibandingkan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. Menurut Rumelt, kelayakan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang memadai agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, indikator *feasibility* menjadi aspek yang paling lemah karena keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, dan anggaran secara langsung mempengaruhi keberhasilan implementasi Program TTG.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Megawati dan Adianto yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan TTG masih terkendala pada aspek kelembagaan, pembiayaan, dan keberlanjutan program. Penelitian ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat.⁷² Dengan demikian, penguatan

⁷² Megawati & Adianto. Peran Teknologi Tepat Guna dalam Pemberdayaan Desa melalui Penguatan BUMDes. *Jurnal Ekonomi dan Sosial UB*. Vol. 5, No. 1, 2021.

Posyantek, peningkatan jumlah tenaga pendamping, serta evaluasi berbasis hasil menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kelayakan implementasi Program TTG.

Berdasarkan keseluruhan analisis menggunakan teori Rumelt, dapat dipahami bahwa strategi DPMG Aceh dalam implementasi Program Teknologi Tepat Guna belum sepenuhnya efektif. Aspek konsistensi relatif telah terpenuhi pada tahap perencanaan, namun indikator kesesuaian, manfaat, dan kelayakan masih menunjukkan berbagai kelemahan sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat belum tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan Program TTG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesesuaian alat dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas pendampingan, kapasitas kelembagaan, mekanisme evaluasi, serta keberlanjutan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, strategi DPMG Aceh perlu diarahkan pada penguatan identifikasi kebutuhan masyarakat, penyempurnaan sistem evaluasi pasca-implementasi, optimalisasi peran Posyantek, serta penetapan standar inovasi yang berorientasi pada kebermanfaatan teknologi agar Program TTG benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Program Teknologi Tepat Guna (TTG), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dalam implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) secara konseptual telah dirancang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017. Strategi tersebut meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pelatihan, penyelenggaraan lomba dan gelar TTG, pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), serta penyaluran teknologi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan analisis menggunakan teori strategi Rumelt, implementasi program belum berjalan secara optimal. Aspek konsistensi telah terlihat pada keselarasan antara tujuan dan program yang direncanakan, tetapi aspek kesesuaian (*consonance*), manfaat (*advantage*), dan kelayakan (*feasibility*) masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya tingkat pemanfaatan alat, belum optimalnya fungsi pendampingan dan Posyantek, serta belum efektifnya penggunaan anggaran, khususnya pada kegiatan lomba TTG yang belum yang belum menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan secara lanjutan oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi DPMG Aceh terhadap Program Teknologi Tepat Guna (TTG) terdiri atas faktor teknis, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengelolaan program. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan masyarakat, lemahnya proses identifikasi kebutuhan sebelum penyaluran alat, terbatasnya tenaga pendamping, belum optimalnya peran Posyantek di berbagai daerah, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan dan memelihara teknologi, serta belum adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kebermanfaatan alat setelah program dilaksanakan. Penyelenggaraan lomba dan gelar TTG lebih berorientasi pada aspek kompetisi dibandingkan pemanfaatan hasil inovasi, sehingga sebagian besar alat yang dihasilkan tidak digunakan oleh masyarakat dan belum memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Teknologi Tepat Guna belum mampu mencapai tujuan utamanya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan strategi yang lebih partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh sistem pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh

DPMG Aceh perlu menetapkan standar *output* yang jelas terhadap teknologi yang diperlombakan maupun yang disalurkan kepada masyarakat. Standar tersebut

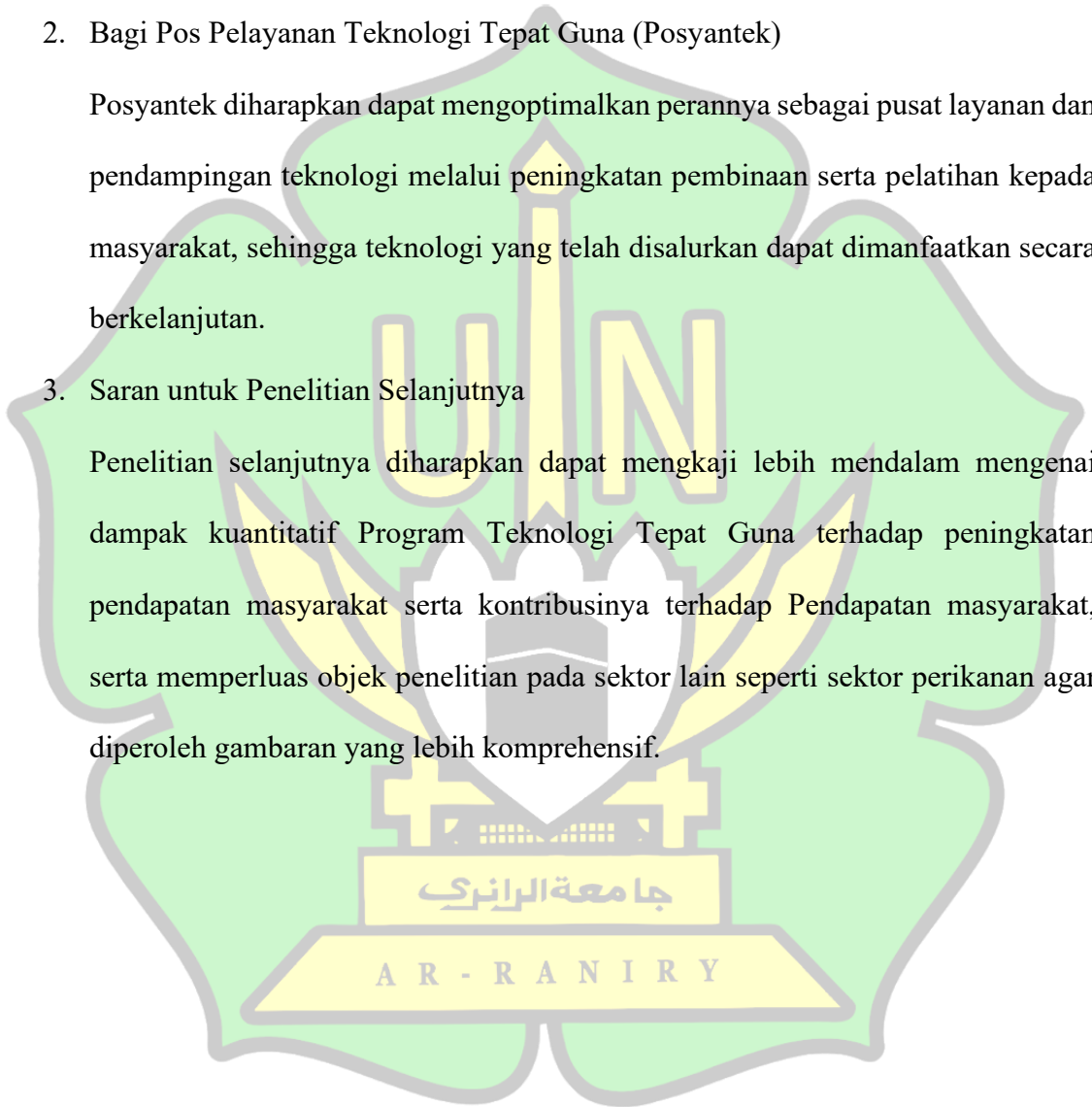
dapat mencakup aspek kelayakan penggunaan, kemudahan operasional, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan pemeliharaan, keamanan penggunaan, serta kemampuan teknologi dalam memberikan nilai tambah ekonomi.

2. Bagi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)

Posyantek diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pusat layanan dan pendampingan teknologi melalui peningkatan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat, sehingga teknologi yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dampak kuantitatif Program Teknologi Tepat Guna terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta kontribusinya terhadap Pendapatan masyarakat, serta memperluas objek penelitian pada sektor lain seperti sektor perikanan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Arista, Zainal Abidin Umar, and Idris Yanto Niode. "Analisis Strategi Bersaing Dan Strategi Bertahan Pada UMKM Di Kota Gorontalo Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UMKM Zoellen Sagela)." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 557–67.
- Agustini, et al. *Metode Penelitian Kualitatif. Mifandi Mandiri Digital*. Vol. 3, 2024.
- Alfiansyah, Afdhal, Mustanir Ahmad, Faried Annisa Ilmi, Mursalat Aksal, Kusnadi Iwan Henri, Fauzan Rusydi, et al. *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Amir, Faisal, and Jumadi Jumadi. "Pengolahan Produk Pasca Panen Hasil Perikanan di Aceh Menggunakan Teknologi Tepat Guna." *Jurnal POLIMESIN* 14, no. 2 (2022): 8. <https://doi.org/10.30811/jpl.v14i2.336>.
- Antarnews.com. "TTG Provinsi Aceh Ke XXVI Yang Berlangsung 29-31 Mei 2024 Di Lapangan Pulau Kayu, Aceh Barat Daya (Abdya)." Antarnews.com, 2025.
- Arifin, Zainal, and Rika Handayani. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Meningkatkan Produktivitas." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 8, no. 2 (2023): 145–56. <https://doi.org/10.21002/jebi.v8i2.1234>
- DPMG. "Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. 'Penyaluran Dana Desa Di Aceh Tahun 2024 Dan Alokasi Tahun 2025,' DPMG Aceh, 2024-2025.," 2024.
- DPMG Banda Aceh. "Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Se-Aceh VIII Tahun 2023." DPMG Banda Aceh., 2023.
- Fitriadi, Fitriadi, Gaustama Putra, Fajar Okta Widarta, Arrazy Elba Ridha, Heri Tri Irawan, Iing Pamungkas, and Abdiel Khaliel Akmal. "Sosialisasi Program Pendampingan Pembuatan Alat Teknologi Tepat Guna (Ttg) Untuk Produksi Kue Karah Di Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 2032–44. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i2.41929>.
- Habapublik. "Aceh Besar Raih Juara 3 Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025," 2025.
- Hidayat, Rahmat, and Dwi Lestari. "Implementasi Teknologi Tepat Guna Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2022): 67–75. <https://doi.org/10.31289/jpmn.v5i1.5678>
- Kbbaceh.news. "Bantuan Alat TTG Pemkab Aceh Selatan Ditolak Masyarakat." Kbbaceh.news, 2020.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Permendagri No. 23 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*. Vol. 1, 2017.

- Kurniawan, Andi, and Siti Rahmawati. "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Inovasi Teknologi di Era Digital." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 10, no. 1 (2024): 23–34. <https://doi.org/10.9744/jmk.10.1.2345>
- Lestari, Puji, and Ahmad Fauzi. "Peran Teknologi Tepat Guna Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Pembangunan* 6, no. 2 (2023): 98–109. <https://doi.org/10.26858/jip.v6i2.3456>
- Ma'ruf, Syamsul, and Indah Permatasari. "Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Teknologi Tepat Guna." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 7, no. 3 (2022): 201–12. <https://doi.org/10.31506/japi.v7i3.4567>
- Maulana, Arman. *Manajemen Strategi*. Bandung: Azka Publisher, 2023.
- Mendagri RI. "Permendagri No. 23 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*. Vol. 1, 2017.
- Mulyati, Yuyun, Muhammad Ridwan Caesar, Ellia Purnama, and Rima Nur Rahmat. "Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung." *Neo Politea* 4, no. 1 (2023): 33–46. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v4i1.1076>
- Ningsih, Tri Wahyuni, and Eko Prasetyo. "Pengaruh Penerapan Teknologi Tepat Guna Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 9, no. 1 (2023): 55–66. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.5678>
- Nugroho, Setyawan Adhi. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna*. Edited by Guepedia/La. Guepedia. Vol. 3, 2021.
- Nur Wahid. *Teknologi Tepat Guna*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2023.
- Pemerintah Aceh. *Laporan Kinerja - Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Aceh Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh, 2023.
- Pemerintah Provinsi Aceh. "Jumlah Peralatan Teknologi Tepat Guna Pertanian Di Desa Menurut Desa Provinsi Aceh (IDM)," 2024.
- Pradani, Yayi Febdia, Dian Julianto Wahyudi, and Danang Yugo Pratomo. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Teknologi Tepat Guna Alat Press Hidrolik Di Bank Sampah Semangka 8, Desa Tambaksari." *I-Com: Indonesian Community Journal* 5, no. 3 (2025).
- Prasetiawan, Budi, and Lilis Suryani. "Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi Untuk Pengembangan Usaha Mikro." *Jurnal Sosial Ekonomi* 11, no. 2 (2024): 120–32. <https://doi.org/10.22146/jse.v11i2.6789>
- Rahman, Abdul, and Yuliana Sari. "Inovasi Teknologi Tepat Guna Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Inovasi Pembangunan* 4, no. 1 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.35308/jip.v4i1.7890>
- Rochaeni, Atik. *Pembangunan Dan Kesejahteraan Publik*. Penerbit Manggu. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Sari, 2025.

- Saleh, M, M Rasyidin, Dasril Azmi, Iin Shintia, Miswardi, and Muhammad Rizal. "Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Penjualan Produk Kelapa Gongseng Aceh Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Teknologi Tepat Guna Dan Pemasaran Digital." *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 400–407. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i2.356>.
- Saputra, Dedi, and Mega Putri. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas UMKM Berbasis Teknologi." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 12, no. 2 (2023): 210–22. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.8901>
- Septiani, Yuni, Edo Arribe, and Risnal Diansyah. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–43.
- Soebianto, Totok Mardikanto, and Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, 2021.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surahman, Hendy. *Manajemen Strategi: Konsep, Teori Dan Implementasi*. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2026.
- Taufiqurokman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.
- Utami, Sri Wahyuni, and Hendra Gunawan. "Analisis Peran Teknologi Tepat Guna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 8, no. 1 (2024): 33–45. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i1.9012>
- Viana, Sintya Okta, and Beni Febriansyah. "Analisis Strategi Bisnis Guna Meningkatkan Daya Saing Pada Coffee Shop Di Bandar Lampung (Studi Kasus QALU)," 2023.
- Wardhana, Aditya. *Strategi Dan Kebijakan Bisnis Di Era Digital*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Wulandari, Novi Diah, Winike Kush Indrajati Aprilia, Agustina Mayangsari, Budi Sutiono, and Pratama Nugraha. "Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Masyarakat Melalui Kemajuan Umkm." *Kopemas* 3 (2022): 340–48.
- Zuhari, Muhammad Agil. "Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mewujudkan Daerah Mandiri Dan Berkelanjutan." *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2025): 160–68.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3083/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian memagang mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pertendahan nomor PDR-50/PR/2007 tentang Pelaksanaan Pengkajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Teknikal Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Siti Nur Zakkiha, M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Siti Sartama**
- NIM : **220602112**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Terhadap Program Teknologi Tepat Guna**
- KEDUA** : Segala pembekuan yang disekatkan oleh surat keputusan ini ditetapkan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Terselenggara** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk disahkan dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Penelitian DPMGA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2722/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : *

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

DPMG ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802112

Nama : SITI SARIMA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Mata ie- cot goh Tuan meurah Desa kp.baroh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH TERHADAP TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Banda Aceh, 26 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 April 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran Surat Izin Permohonan Penelitian Gampong Cot Buklat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2722/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

DPMG ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802112

Nama : SITI SARIMA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Mata ie- cot goh Tuan meurah Desa kp.baroh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH TERHADAP TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Banda Aceh, 26 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Janunr, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 April 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH ACEH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Jalan Tgk. Syech Mudawall No. E-19 Telp. (0651) 26326, 26323 Fax (0651) 26324, e-mail: bpmg@acehprov.go.id
BANDA ACEH 23242

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/ 417-DPMG

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menerangkan bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : SITI SARIMA
NPM : 220802112
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar -Raniry
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah menyelesaikan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dengan Judul Penelitian "Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Terhadap Teknologi Tepat Guna".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Juni 2026



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Dr. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si

PENBINA UTAMA MADYA

NIP. 19751223 199311 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Fitriyana, S.STp., Kepala Sub Bagian Program Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh



Wawancara dengan Faisal, S.IP., M.M., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna DPMG Aceh



Wawancara dengan Fakhrul Razi, ST, M.M., Staf Posyantek Provinsi Aceh



Wawancara dengan Darmawan, Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG)



Wawancara dengan Nurjannah, Masyarakat Penerima Manfaat Teknologi Tepat Guna (Petani)

